



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH SUMATERA BARAT
PERIODE 1993-2008**

OLEH :

**YUDI HARDIAN
05 151 046**

Mahasiswa Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi

*Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2011**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEM.PENGARUHI DERAJAT
OTONOMI FISKAL DAERAH SUMATERA BARAT PERIODE 1993-2008**

Skripsi S-1 Oleh Yudi hardian, Pembimbing, Dr.Hefrizal Handra,M.Soc.Sc

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat periode 1993-2008. Selain itu penelitian ini juga menerapkan analisis deskriptif untuk melihat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan analisis kuantitatif untuk melihat signifikansi variabel secara individual dan variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa derajat otonomi fiskal dipengaruhi secara signifikan oleh investasi pemerintah secara langsung. Sedangkan Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat di pengaruhi secara tidak signifikan oleh investasi swastanya. Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat dipengaruhi oleh PDRB. Faktor yang paling dominan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat adalah investasi pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 (yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kedua undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, baik berkaitan dengan masalah desentralisasi kewenangan (*power sharing*) maupun desentralisasi keuangan (*fiscal decentralization*). Pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat tercipta, antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah;
- b. Berkembangnya kehidupan yang demokratis yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; serta

- c. Terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soedjito dalam Mulyanto, 2002: 1-2).

Dengan ditetapkannya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No.25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004; mengisyaratkan adanya 4 (empat) pilar yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a. Kapasitas aparat daerah;
- b. Kapasitas kelembagaan daerah;
- c. Kapasitas keuangan daerah, dan
- d. Kapasitas lembaga nonpemerintah di daerah.

Secara umum, faktor-faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu (Kaho, 2002: 60): (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (ii) faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (iii) faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; serta (iv) faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik, efisien, dan efektif.

Dari paparan di atas jelaslah bahwa faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan

baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya.

Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, dan begitu pula sebaliknya. Tetapi mengharapkan PAD sebagai sumber utama sehingga peranannya mencapai katakanlah 90 % adalah sesuatu yang mustahil, Sumatera Barat memiliki persentase PAD masih rendah, dimana persentase PAD terbesar selama periode 2000-2004 sebesar 54,84 persen pada tahun 2004. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas.

Untuk mengurangi ketergantungan finansial tersebut Pemda harus merancang dan menerapkan berbagai cara untuk meningkatkan PAD, yang meliputi:

1. Intensifikasi dan eskstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak,
2. Eksplorasi sumber daya alam, dan
3. Skema pembentukan kapital (*capital formation*) atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.

Dari ketiga pilihan kebijakan ini, tampaknya skim menarik investor merupakan suatu pilihan yang paling bersifat *sustainable* dan mempunyai *economic multiplier effects* yang bermanfaat, yaitu *employment creation*. Pilihan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan tekanan inflasi, sedangkan pilihan kedua, terutama jika sumber daya yang tersedia bersifat *non-renewable*, akan terbentur pada persoalan keberlanjutan (Irawan, 2002:1).

Di Sumatera Barat sumber-sumber pembiayaan yang memadai, yang secara umum berasal dari: (i) investasi pemerintah pusat melalui kegiatan/dana sektoral; (ii) investasi pemerintah daerah, baik dari propinsi maupun dari kabupaten/kota; serta (iii) investasi dari sektor swasta, baik oleh masyarakat maupun oleh dunia usaha (Mulyanto, 2002:5-7).

Investasi ini juga merupakan salah satu komponen utama dalam meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah dan pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Persentase Laju pertumbuhan PDRB selalu meningkat setiap tahunnya. Besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai ditentukan oleh kemampuan investasi yang dapat dilakukan, baik investasi secara agregat maupun investasi pada masing-masing sektor ekonomi. Investasi yang dilakukan itu akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan regional. Investasi secara agregat dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta, besarnya kebutuhan investasi ini tergantung pula pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dapat disediakan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun non pemerintah dalam pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali harus menerapkan kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat mendorong investasi di sektor swasta (Suryana, 2000:109). Dilihat dari perkembangan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta (PMDN&PMA) diatas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Investasi pemerintah yang terbesar dilihat dalam periode tahun 1993-2008 adalah investasi pemerintah yang ditanam pada tahun 2006 sebesar

1.513493,80 juta rupiah. Dan Investasi Swasta (PMDN&PMA) yang terbesar selama periode 1993-2008 adalah investasi yang ditanamkan pada tahun 2005 sebesar 1.448.203,76 juta rupiah.

Kebijakan desentralisasi fiskal telah membawa perubahan mendasar pada kebijakan pembangunan hampir semua sektor di Sumatera Barat ini, seperti, sektor pertanian, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi. Pada sektor-sektor tersebut, kebijakan dan arah pembangunan akan lebih banyak ditentukan oleh daerah. Hal ini menimbulkan peluang pengembangan produksi sesuai dengan potensi wilayah sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Apabila dilihat pola struktur ekonomi Sumatera Barat secara umum dapat diketahui bahwa perekonomian daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor Pertanian/Primer. Sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian Sumatera Barat. Berdasarkan peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, penerimaan daerah juga akhirnya akan mengalami peningkatan pula.

Berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini antara lain :

1. Sejauh mana Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan PDRB mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat?
2. Sejauh mana Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat?

3. Sejauh mana PDRB mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat?
4. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis:

1. Menganalisis Pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan PDRB terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat.
2. Menganalisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat.
3. Menganalisis Pengaruh PDRB terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat.
4. Menganalisis Faktor yang dominan mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Penulis, menambah wawasan ilmiah dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
2. Pemerintah Daerah, sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
3. Bagi masyarakat luas dan mahasiswa sebagai tambahan referensi dan bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan rincian tiap-tiap bab sebagai berikut:

- BAB I :Berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.
- BAB II :Berisi tentang kerangka teori yang terkait dengan judul penelitian dan menyajikan penelitian terdahulu yang akan menjadi tinjauan literatur dalam penelitian ini.
- BAB III :Membahas tentang metodologi penelitian.
- BAB IV :Berisi hasil dan analisis yang menggambarkan tentang analisis deskriptif dan analisis regresi dari variabel yang di teliti.
- BAB V :Merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut, bahwasanya Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat dipengaruhi secara positif oleh investasi pemerintah, investasi swasta dan PDRB. Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat dari tahun 1993 sampai 2008 cenderung menurun. Penurunan tersebut merupakan salah satu dampak yang di timbulkan oleh adanya Desentralisasi Fiskal. Tingkat ketergantungan Daerah terhadap pusat masih tinggi, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah.

Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat dipengaruhi secara signifikan oleh investasi pemerintah secara langsung. Sedangkan Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat di pengaruhi secara tidak signifikan oleh investasi swastanya. Derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat dipengaruhi oleh PDRB. Hal ini terbukti dari nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Kondisi ini berarti setiap peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terjadi peningkatan derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat adalah investasi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan secara langsung pengaruh antara variabel investasi pemerintah, investasi swasta dan PDRB terhadap derajat otonomi fiskal daerah Sumatera Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian yang dikemukakan diatas, saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Agar kebijakan pemerintah dalam bentuk investasi pemerintah dapat diupayakan secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat lebih dirasakan oleh masyarakat manfaatnya dan dapat menunjang pencapaian kesejahteraan masyarakat,
2. pemerintah perlu berupaya untuk menarik investor, sehingga meningkatkan investasi swasta dengan cara menciptakan iklim usaha yang kondusif, iklim investasi serta mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan penanaman modal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Akai, Nobuo dkk. 2007. *Fiscal Decentralization and Economic Volatility-Evidence from State-Level Cross-section Data of The United Stated*.
- Anas, Anidar. 2002. *Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Padang*. Tesis : Program Ekonomi Publik Magister Manajemen UNP.
- Aswin. 2005. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah)*,(online)(www.ringkas_proposal/Aswin), diakses 14 Mei 2005).
- Bahl, Roy. 1999. *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*. International Studies Program. Georgia State University.
- Bird, M Richard. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPF.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Irawan, Andi. 2002. *Kondisi Fiskal dan Perekonomi di Era Otda*, (online),(www.kompas.com/otonomi) daerah, diakses 8 oktober 2005).
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.

- Kaho, Joseph Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mulyanto. 2002. *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Sobosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah*, (online), (www.pajak.pdf), diakses 30 juni 2005).
- Nugroho. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. CV. Andi offset; Yogyakarta.
- Paisal, Eko. 2003. *Pengaruh Investasi Sektor Pemerintah dan Investasi Sektor Swasta Terhadap PDRB daerah Sumbar*. Tesis: Program Ekonomi Publik Magister Manajemen UNP.
- Prakosa. Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*, JAAI Volume 8 No. 2, Desember 2004.
- Sarundajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Yudoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Sidik, Machfud. 2002. *Kebijakan, Implementasi, dan pandangan ke depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional, Yogyakarta, 20 April 2002, (online), (http://des_fiskal.pdf), diakses 21 Mei 2004)
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan I*. Jakarta: FE UI.

- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba.
- Susiyati, B Hirawan. 1994. *Peluang PemDa dalam meningkatkan PAD*. Jurnal PWK NO. 11 / Februari 1994. Yogyakarta.
- Todaro, M. 1989. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (online), (<http://www.uu322004.pdf>, diakses 27 Mei 2004)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, (online), (http://artikel_uu_33-2004_KeuanganDaerah.html, diakses 3 Juni 2004)
- Widarjoyo, Agus. 2005. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, edisi ke-2.
- Wangke, Freddy. 2002. *Peranan Sektor Publik dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Pada Era Otonomi: Suatu Pendekatan Teoritis, pada Public Choice*, (online), (www.google.com/otda diakses 6 september 2005).
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.